

## **SISTEM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PERSPEKTIF MILK AL DAULAH: STUDI PADA PEMADAM KEBAKARAN BANDA ACEH**

**Karatun Aini Nurvira, Muhammad Maulana, Azmil Umur**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondence Email: 190102075@student.ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

The Banda Aceh City Fire and Rescue Service must ensure that fire extinguishers are well maintained and can be used at any time in an emergency. Fire extinguishers are state property that are useful for the community. Therefore, the author aims to conduct research to find out how fire extinguishers are inspected at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service, as well as what Milk al Daulah's perspective is regarding checking fire extinguishers at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service. This research uses a sociological juridical method with a qualitative research type, and data was obtained using interview techniques and documentation. Based on the research results, it was found that, first, inspection and maintenance of fire extinguishers at the Banda Aceh City Fire and Rescue Service was carried out by checking and warming up the engine, checking lubricants and fuel, checking the condition of tires, checking the braking system, checking equipment completeness. fire extinguisher, electrical system inspection, exterior maintenance, water tank drain, and vehicle roadworthiness test. Maintenance is carried out regularly at certain time intervals. Usually every 3 months, 6 months or 1 year. Depends on manufacturer's instructions, vehicle model and components used. Second, the Banda Aceh City Fire and Rescue Service is responsible for inspecting fire extinguishers. So that these tools function and are used properly when a fire disaster occurs. Maintaining fire extinguishers provides benefits to the community. The Banda Aceh city fire and rescue service as the regional government has done its job well in carrying out inspections of fire extinguishers, therefore this is in accordance with the concept of milk al-daulah

**Keywords:** *Inspection, Fire Extinguisher, Milk al-daulah.*

### Abstrak

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh harus memastikan alat-alat pemadam kebakaran terjaga dengan baik, dan dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Alat-alat pemadam kebakaran merupakan harta milik negara yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui terkait bagaimana pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, serta bagaimana perspektif milk al daulah terhadap pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif, dan data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, pertama, Pemeriksaan dan perawatan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh di lakukan dengan cara pemeriksaan dan pemanasan mesin, cek pelumas dan bahan bakar, pemeriksaan kondisi ban, cek sistem pengereman, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam, pemeriksaan sistem kelistrikan, perawatan eksterior, kuras tangki air, dan uji kelayakan jalan kendaraan. Perawatan dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tergantung intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan. Kedua, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep milk al-daulah

**Kata kunci:** Pemeriksaan, Alat Pemadam Kebakaran, Milk al- daulah..

### PENDAHULUAN

Harta milik negara (*milk al daulah*) dalam perspektif fiqh muamalah merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat secara bersama-sama memanfaatkan *milk al daulah* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu teritorial. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, tidak boleh

bertindak sewenang-wenang, melanggar dan mengambil hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.<sup>1</sup>

Kepemilikan umum dapat disamakan dengan kepemilikan negara. Kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengelola demi kepentingan rakyat.

Petugas pemadam kebakaran atau yang biasa disingkat damkar adalah pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, bagi korban kebakaran. Petugas pemadam kebakaran pada masa lenggangnya, juga bisa dikerahkan untuk membantu korban bencana, kecelakaan penyelamatan bunuh diri atau hewan yang terjebak, dan hal-hal lain yang menyangkut kerugian massal, yang mengacu kepada permendagri 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Pemadam kebakaran umumnya berada dalam naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan kebakaran yang dipimpin oleh kepala Dinas atau kepala badan. Kepala dinas/badan ini akan membawahi beberapa kepala bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kepala Dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Kepala Dinas pemadam kebakaran juga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

<sup>2</sup> <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/08/20/apa-itu-damkar/>  
Diakses pada tanggal 06 Juli 2022

administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.<sup>3</sup>

Alat pemadam kebakaran telah banyak dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat dan perusahaan. Alat pemadam api ringan (apar) merupakan salah satu peralatan wajib yang harus ada untuk menjamin keselamatan di tempat-tempat umum seperti perbelanjaan, hotel, perkantoran, tempat pendidikan dan bahkan rumah pribadi pun perlu memiliki alat pemadam kebakaran untuk keselamatan. Alat pemadam kebakaran yang ada dalam masyarakat perlu adanya perawatan agar ketika saat akan digunakan, dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah melakukan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian pada alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat.

Yudi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran menyatakan bahwa peralatan pemadam kebakaran ada dua, yang pertama armada dan kedua kelengkapan peralatan pendukung seperti baju, sepatu, helm, dan alat-alat evakuasi. Perawatan alat pemadam kebakaran hanya dilakukan sebatas penyucian. Tetapi kalau armada sudah masuk kedalam anggaran penggantian oli, sedangkan kerusakan kecil atau ringan upayanya yaitu perbaikan ke bengkel, dan perlengkapan pendukung pada mobil tersebut jika kotor maka akan dilakukan penyucian dari personil atau karyawannya, juga dapat ditanggung oleh doorsmeer.<sup>4</sup>

Alat pemadam kebakaran seperti baju, alat pemadam api, mobil pemadam dan lain sebagainya termasuk harta milik negara (*milk al-daulah*) yang merupakan harta bersama. Adapun korelasi antara pemeliharaan dan perawatan terhadap instrumen milik negara adalah bahwa instrumen tersebut perlu dirawat dan dijaga secara optimal agar fungsi dan kegunaannya bisa maksimal diperuntukkan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk kepentingan masyarakat. Pihak pegawai wajib memelihara dan merawat aset tersebut. Aset tersebut tidak boleh dirusak, diperlakukan sewenang-wenang, dan juga tidak boleh

---

<sup>3</sup> TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 dari situs: <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/>

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.

menjadikannya milik pribadi serta memanfaatkannya untuk kepentingan perorangan atau pribadi.

Pada kasus yang terjadi di Suzuya Mall Banda Aceh upaya pemadaman api yang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Banda Aceh mengalami kendala dalam proses penanganannya. Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, Yubasri, menyampaikan bahwa untuk saat ini pihaknya memiliki 14 unit mobil pemadam, tapi tidak semuanya siap untuk dioperasikan. Sebagian besar perlu perbaikan intensif mengingat sebagian dari armada tersebut sudah berusia 20 tahun ke atas, bahkan 3 unit sudah rusak berat. Selain itu kondisi peralatan APD personel pemadam yang juga sangat memprihatinkan, seperti baju tahan api dan baju tahan bara yang sudah berusia hampir 20, begitu juga dengan kondisi tabung gas dan beberapa peralatan lainnya. Jadi dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh dalam penanganannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran.<sup>5</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis ini bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

*Pertama*, hasil penelitian Muhammad Syahidin yang berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang". Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota semarang peneliti menemukan masih memiliki beberapa kekurangan seperti waktu permohonan yang relative lama yaitu lebih dari 7 hari yang seharusnya maksimal 5 hari kerja sesuai dengan SOP dan kurangnya data penyebaran alat pemadam kebakaran di Kota Semarang. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan daerah Kota

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Yubasri selaku Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, pada tanggal 19 Juli 2022

Semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di kota semarang peneliti menemukan beberapa faktor penghambat seperti lamanya proses perijinan maksimal 5 hari kerja tetapi terjadi lebih dari 5 hari seperti yang telah dialami narasumber bapak arif sebagai pengguna jasa, beberapa pemohon yang tidak menaati peraturan dan kurangnya data terkait jumlah apar di masyarakat.<sup>6</sup>

*Kedua*, hasil penelitian Tri Gunawan, yang berjudul “*Sistem Pemeriksaan Keandalan Bangunan dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. (Studi Kasus Bangunan Pusat Perbelanjaan Solo Square)*”, hasil analisa berupa desain sistem pemeriksaan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dengan penilaian kelengkapan tapak 21%, sistem sarana keselamatan 20%, sistem proteksi pasif 19%, sistem proteksi aktif 24% dan sistem manajemen pencegahan kebakaran 16%. Sedangkan pada manajemen adalah pemeriksaan dan pemeliharaan 32 %, pembinaan dan pelatihan 24%, rencana keadaan darurat 21% dan pekerjaan kerumahtanggaan 23%. Penilaian dilakukan pada level terkecil. Hasil pemeriksaan pada bangunan pusat perbelanjaan Solo Square menunjukkan bahwa sistem kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, proteksi pasif, proteksi aktif dan manajemen adalah "andal" terhadap pencegahan bahaya kebakaran. Penerapan sistem ini mampu memberikan penilaian yang lebih detail pada sistem pencegahan kebakaran.<sup>7</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Siti Rohaya yang berjudul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Besar sudah melakukan

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahidin, *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang*, UNNES, 2017.

<sup>7</sup> Tri Gunawan, *Sistem Pemeriksaan Keandalan Bangunan dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. (Studi Kasus Bangunan Pusat Perbelanjaan Solo Square)*, UNS, 2011.

fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah undang-undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di kecamatan Indrapuri.<sup>8</sup> Penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik siti rohaya ini memfokuskan mengenai bagaimana sistem perlindungan pemkab dan yang menjadi objeknya ialah pertambangan batuan sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji memfokuskan bagaimana sistem pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam perspektif *milk al daulah*.<sup>9</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Lia Novita Sari, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan judul *Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)* Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah kota banda aceh. Kedua, bagaimana tinjauan *milk aldaulah* terhadap pengaturan pengkaplingan tanah sempadan pada pemilik usaha di wilayah kota banda aceh.<sup>10</sup>

*Kelima*, penelitian yang lain juga dilakukan oleh Nazarni, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, prodi hukum ekonomi syariah, universitas islam negeri ar- raniry banda aceh dengan judul *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah* tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat

---

<sup>8</sup> Siti Rohaya, Skripsi: "*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)*", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018.

<sup>9</sup> Chairul Fahmi et al., 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>

<sup>10</sup> Lia Novita Sari, Skripsi: "*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Oleh Pemerintah Pada Pemilik Usaha Ditinjau Dari Perspektif Milk al Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018.

menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun, dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang- kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.<sup>11</sup>

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh nazarni, fokus penelitiannya adalah bagaimana pemanfaatan daerah aliran sungai krueng aceh oleh masyarakat kecamatan ingin jaya ditinjau menurut perspektif *milk al-daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat kecamatan ingin jaya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis sistem pemeliharaan dan perawatan instrumen pemadam kebakaran dikota Banda Aceh dalam perspektif *milk al-daulah*.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan sistem pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam perspektif *milk al daulah*.

Untuk dapat menganalisis data penelitian yang merupakan bagian penting dalam menentukan hasil akhir dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Sumber data yaitu subjek dari mana data penulis dapatkan atau peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara dan Dokumentasi.

---

<sup>11</sup> Nazarni, "Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah", Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2013.



Penulis menggunakan validitas data yaitu dengan menggunakan dasar dari teori atau konsep kemudian diturunkan menjadi beberapa aspek atau indikasi dengan data yang valid. Hal ini bertujuan data yang diperoleh dari objek tersebut sudah relevan dengan tujuan penelitian. Penulis menggunakan smartphone dan alat tulis seperti pulpen dalam mencatat berbagai hal serta menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi seluruh data yang diperoleh dari pihak yang diwawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Untuk menunjang pekerjaan / tugas mereka memerlukan berbagai macam peralatan, penyesuaian peralatan pada petugas pemadam kebakaran mutlak di perhatikan dari sisi fungsi maupun kesesuaiannya dikarenakan akan mempengaruhi hasil dari tujuan dan pengoperasian peralatan penunjang tersebut. Dalam hal ini dari beragamnya peralatan penunjang yang sering digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan pemadaman dini / kecil biasanya digunakan selain APD (alat pelindung diri) adalah APAR yang digunakan untuk mematikan api awal. Dalam menjalankan tugasnya pemadam kebakaran dituntut untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin supaya api tidak menjarah banyak tempat. Bersamaan dengan itu, bahaya dapat terjadi bermacam-macam baik itu berisiko tinggi atau rendah sehingga wajib bagi petugas pemadam kebakaran menggunakan APD. APD atau alat pelindung diri diwajibkan untuk digunakan yang telah ditentukan oleh SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku dimana penggunaan APD meliputi pelindung kepala, tubuh, tangan dan kaki. Dengan menggunakan APD petugas dapat meminimalisir cedera yang kemungkinan akan terjadi / menimpa dirinya pada saat melaksanakan pemadaman ataupun dalam rangka mengevakuasi orang lain yang tertimpa musibah. Beberapa APD yang dimaksud adalah baju anti bara

yang terdiri dari 3 lapisan celana dan 3 lapisan baju, sepatu, sarung tangan, dan helmet.<sup>12</sup>

Sebelum melaksanakan pengoperasiannya ada beberapa hal yang harus diperiksa oleh petugas pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran berangkat yaitu pengecekan terhadap, tekanan ban, isi tangki bahan bakar, radiator, minyak pelumas mesin, *battery* (accu), bahan pemadam isi penuh dan lain-lain. Seorang petugas pemadam kebakaran yang harus mengetahui beberapa hal terkait dengan mobil pemadam kebakaran untuk memudahkannya saat sedang bertugas. Hal-hal tersebut antara lain, tombol untuk memasukkan pompa busa, tombol untuk memasukkan pompa air, transfer *valve* untuk mengatur debit dan tekanan, tombol/handle gas, petunjuk tekanan (*pressure gauge*), *discharge valve*, *pressure relief valve*, dan peralatan peralatan lainnya.

Sama seperti alat berat pada umumnya, performa truk pemadam kebakaran bisa mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Peralatan dan komponen pada mobil damkar juga bisa mengalami kerusakan atau berbagai masalah lainnya. Untuk memastikan operasional mobil pemadam kebakaran tetap optimal, sangat diperlukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin. Inspeksi rutin mobil damkar akan memastikan semua sistem dan komponen berfungsi dengan baik.

Pengecekan mobil damkar bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kecil dan mengatasinya sebelum menjadi kerusakan yang lebih serius. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kerusakan dan kegagalan operasional kendaraan.<sup>13</sup> Dengan menjalankan perawatan rutin, umur pemakaian mobil pemadam kebakaran juga akan semakin panjang. Perawatan sederhana seperti penggantian oli bisa mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang masa pakai kendaraan. Jadi, perawatan mobil pemadam kebakaran sangat penting untuk menjaga kondisi optimal, keandalan, keselamatan, dan umur pakai kendaraan pemadam kebakaran tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Chairul Fahmi, 'THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-Learned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach', *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? (2012): 11, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/231/105>.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, Staf Wadanru 2, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.

Perawatan mobil pemadam kebakaran yang lebih sering akan lebih baik untuk menjaga kinerjanya tetap optimal. Jadi, pastikan untuk menjalankan perawatan secara disiplin dengan melakukan pemeriksaan rutin dan teratur. Dalam rangka menjaga performa armada pemadam kebakaran, pemeriksaan dan perawatan rutin sangat perlu dilakukan.

### **Perspektif Milk Al-Daulah terhadap Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh**

Persoalan harta dan kepemilikan sudah diatur dengan jelas, seperti batas-batas kepemilikan, cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan. Dalam konsep fiqh muamalah kepemilikan negara (*milk al daulah*) adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dimana wewenang pengelolaannya diserahkan kepada negara, negara berhak memberikan atau mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum muslim / rakyat sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan oleh negara adalah pemerintah memiliki wewenang terhadap pengelolaan atas harta milik negara.<sup>15</sup>

Pemanfaatan dan pengelolaan harta milik negara tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan harta milik negara dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak, berlaku sewenang-wenang, dengan merebut hak orang lain dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain memanfaatkannya.<sup>16</sup>

Dalam hal harta kepemilikan negara (*milk al daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat dan bahkan pemerintah, karena tujuan dari kepemilikan negara adalah kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Seperti halnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh. Alat-alat pemadam kebakaran sangat berfungsi dalam melindungi masyarakat-masyarakat yang terkena musibah kebakaran, oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

---

<sup>15</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", hlm.156.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.79.

(DPKP) Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه (رواه المالك)

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan, maka Allah memudharatkannya dan barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”. (HR. Imam Malik)<sup>17</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab mempertahankan eksistensi *milk al-daulah* agar terhindar dari persoalan mendasar seperti penguasaan oleh seseorang/ kelompok secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Perlindungan terhadap harta milik negara harus dilakukan pemerintah agar terpenuhinya kepentingan masyarakat tanpa sikap diskriminatif dan pandang bulu.

Usaha untuk mempertahankan eksistensi *milk al-daulah* dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta yang dipakai untuk mendirikan usaha agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang buruk, serta menetapkan sanksi yang susah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh *syara'*.<sup>18</sup>

Dalam Islam, peran pemerintah dalam mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55 :

---

<sup>17</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2019), hlm. 80

<sup>18</sup> Asmuni, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al Syari’ah)”, *Jurnal Millah*, Vol. V No.2, hlm 300-301.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur [24]:55)<sup>19</sup>

Dalam Q.S An-Nur ayat 55 dijelaskan bahwa prasyarat seorang untuk memperoleh kekuasaan, menjadi Khalifah adalah merealisasikan dirinya pada keimanan dan melakukan amal saleh. Kedua hal tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam Al-Qur’an, dimana kaum Bani Israil telah dijadikan penguasa (khalifah) di bumi Syam dengan membinasakan kaum angkara murka. Cara inilah kemudian menyebabkan umat Islam memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ketakutan hanyalah kepada Allah semata. Islam sebagai bentuk kekuatan yang telah dibentuk sedemikian kukuh dan kuat sebagai pegangan dan pondasi umat Islam.<sup>20</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa khalifah sebagai penguasa di muka bumi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh manusia yang beriman bukan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

<sup>19</sup> QS. An-Nur [24]: 55.

<sup>20</sup> Chairul Fahmi, ‘The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

(DPKP) Kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran sesuai dengan SOP, berita acara pemeriksaan rutin dan peraturan yang telah ditetapkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh, seperti pengecekan mobil damkar, pengantian oli, pemeriksaan tekanan udara pada ban, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam kebakaran (APD, APAR, selang, tangga, mesin air, tangki, dll), pemeriksaan sistem kelistrikan, dan perawatan ekterior lainnya. Pemeriksaan tersebut telah dilakukan secara berkala baik perawatan harian dan perawatan yang dilakukan dalam interval waktu tertentu setiap 3 bulan, 6 bulan atau pun satu tahun sekali, tergantung pada intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan. oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep *milk al-daulah*.

Untuk memastikan operasional mobil pemadam kebakaran tetap optimal, sangat diperlukan perawatan dan pemeriksaan secara rutin. Inspeksi rutin mobil damkar akan memastikan semua sistem dan komponen berfungsi dengan baik. Biasanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh sebelum mobil pemadam kebakaran berangkat melakukan pemeriksaan terhadap, tekanan ban, isi tangki bahan bakar, radiator, minyak pelumas mesin, *battery* (accu), bahan pemadam isi penuh dan lain-lain.

Seorang petugas pemadam kebakaran yang harus mengetahui beberapa hal terkait dengan mobil pemadam kebakaran untuk memudahkannya saat sedang bertugas. Hal-hal tersebut antara lain, tombol untuk memasukkan pompa busa, tombol untuk memasukkan pompa air, transfer *valve* untuk mengatur debit dan tekanan, tombol/handle gas, petunjuk tekanan (*pressure gauge*), *discharge valve*, *pressure relief valve*, dan peralatan peralatan lainnya.<sup>21</sup>

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh semua armada pemadam kebakaran harus menjalani pemeriksaan harian sebelum digunakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh melakukan perawatan berkala yang dilakukan sesuai SOP , yaitu dalam interval waktu tertentu, biasanya

---

<sup>21</sup> Chairul Fahmi, 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim', *Ekbisi* 5, no. 1 (2010), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.

setiap 3 bulan, 6 bulan, atau satu tahun sekali. Jika terjadinya kerusakan terhadap alat-alat pemadam kebakaran maka akan dilakukan perbaikan oleh teknisi pemadam kebakaran, apabila terjadinya kerusakan terhadap mobil pemadam kebakaran maka akan dilakukan perbaikan di bengkel.

Penulis berpendapat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya dengan baik dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap alat-alat pemadam kebakaran secara rutin dan berkala. Dengan adanya pemeriksaan dan perawatan secara rutin dan berkala maka alat-alat pemadam kebakaran bisa terjaga dengan baik, dan dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Sad ayat 26 Allah berfirman sebagai berikut :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Sad [38]: 26).<sup>22</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksa pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak.

## KESIMPULAN

Pemeriksaan dan perawatan alat pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pemanasan mesin, cek pelumas dan bahan bakar, pemeriksaan kondisi ban, cek sistem pengereman, pemeriksaan kelengkapan alat pemadam, pemeriksaan sistem kelistrikan, perawatan eksterior, kuras tangki air, dan uji kelayakan jalan kendaraan. Perawatan dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu.

---

<sup>22</sup> QS. Sad [38]: 26

Biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tergantung intruksi pabrikan, model kendaraan dan komponen yang digunakan.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Alat-alat pemadam kebakaran sangat berfungsi dalam melindungi masyarakat-masyarakat yang terkena musibah kebakaran, oleh karena itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut. Supaya alat-alat tersebut berfungsi dan digunakan dengan baik ketika musibah kebakaran terjadi. Dengan terawatnya alat-alat pemadam kebakaran memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh selaku Pemerintah daerah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, oleh karena itu hal ini sudah sesuai dengan konsep milk al-daulah. isa lebih besar dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang lebih signifikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004.
- Abiza Rusli, " *Pengalihan Hak Pakai Tamah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960*", Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dinata Sukma Syadiah Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Chairul Fahmi. 'THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach'. *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? (2012): 11.  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/231/105>.
- Fahmi, Chairul. 'Pajak Dalam Syariat Islam: Kajian Normatif Terhadap Kedudukan Wajib Pajak Bagi Muslim'. *Ekbisi* 5, no. 1 (2010).  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/view/2648>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.



- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHDs)* 8 (2023): 40.  
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.
- Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Hasil wawancara dengan Hermansyah, Staf Wadanru 2, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Yubasri selaku Plt Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banda Aceh, pada tanggal 19 Juli 2022
- Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, pada tanggal 19 Juli 2022.
- Hasil wawancara dengan Yudi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Oktober 2023.
- Lia Novita Sari, "*Pengaturan Pengkaptlingan Tanah Sempadan oleh Pemerintah pada Pemilik Usaha di Tinjau dari Perspektif Milk AlDaulah Studi Kasus di Kota Banda Aceh*", Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar raniry tahun 2018.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: 2000
- Muhammad Syahidin, *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang*, UNNES, 2017.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nazarni, "*Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya menurut Perspektif Milk al-Daulah dalam Fiqih Muamalah*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2013).
- Siti Rohaya, Skripsi: "*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian*

- 240 *Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Perspektif Milk Al Daulah: Studi Pada Pemadam Kebakaran Banda Aceh*  
@ Karatun Aini Nurvira, Muhammad Maulana, Azmil Umur

*Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

Tri Gunawan, *Sistem Pemeriksaan Keandalan Bangunan dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. (Studi Kasus Bangunan Pusat Perbelanjaan Solo Square)*, UNS, 2011.

TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 dari situs : <https://damkar.bandaacehkota.go.id/tupoksi/>

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Jakarta: Darul Fikr, 2007.

Warson Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.